



PENGHARGAAN  
REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA  
2016

# PENGHARGAAN

## REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA

- Dianugerahkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah;
- Penghargaan ini bertujuan mendorong Kabupaten/ Kota di DIY untuk menyiapkan rencana pembangunan dengan lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan implementatif;
- Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan lebih bermutu;
- Seleksi untuk penetapan Anugerah Reka Cipta Bakti Nugraha diawali dengan penilaian terhadap Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan (2016) dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY, secara bertahap dan berjenjang oleh tim juri independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY.

# SIMBOL SIMBOL PADA REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA



## Garuda Pancasila

sebagai Lambang Negara Indonesia dengan 5 (lima) sila didalam Pancasila;

## Warna Hijau dan Kuning

melambangkan simbol Pareanom "pare" ialah tanaman merambat berwarna hijau yang buahnya jika masih muda berwarna hijau kekuning-kuningan, dan kata "anom" berarti 'muda'. Secara filosofis menyimbolkan kesuburan Tanah Air kita yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

## Sayap warna hijau dan kuning

disamping kanan dan kiri, serta bagian tengah piala melambangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY;

## Simbol Jogja Istimewa

Logo Baru Jogja yang melambangkan egaliterisme, kesederajatan dan persaudaraan. Dengan warna merah bata, sebagai warna perlambang keraton dan spirit keberanian untuk mewarnai zaman baru (masa depan) berbekal akar budaya masa lalu yang diperkaya kearifan lokal yang genuine

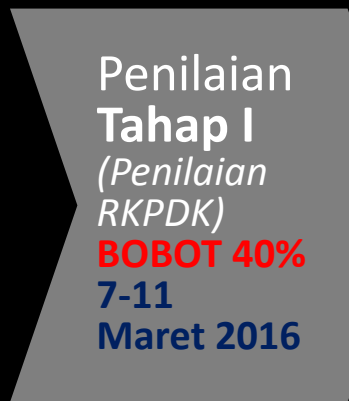
# REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA & ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA



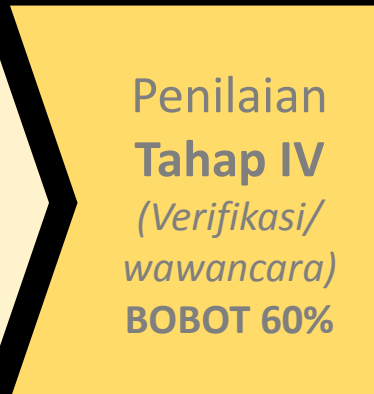
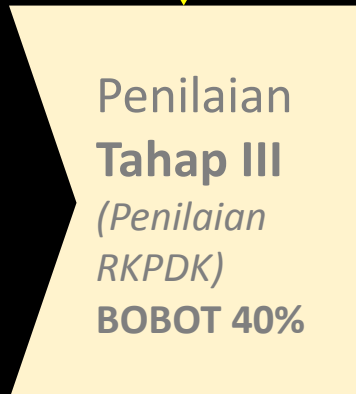
Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap Kabupaten/Kota untuk diusulkan pada seleksi **Anugerah Pangripta Nusantara** tingkat Nasional



# ALUR PROSES PENILAIAN



**REKA CIPTA  
BHAKTI NUGRAHA**



**ANUGRAH  
PANGRIPTA NUSANTARA**



**PENILAIAN  
TAHAP I**  
*(oleh Tim Penilai  
Provinsi)*

**&**

**PENILAIAN  
TAHAP III**  
*(oleh Tim Penilai  
Pusat)*

## PARAMETER

## INDIKATOR

1. KETERKAITAN  
(15 %)

2. KONSISTENSI  
(20 %)

3. KELENG-  
KAPAN &  
KEDALAM-  
AN (40 %)

4. KETERUKURAN  
(10 %)

5. INOVASI  
KEBIJAKAN  
(15 %)





**PENILAIAN  
TAHAP II**  
*Penilaian  
Verifikasi  
Proses  
Penyusunan  
Dokumen  
RKPDK tahun  
2016  
(oleh Tim Penilai  
Provinsi)*

**KRITERIA**

**PARAMETER**

**INDIKATOR**

**BOBOT**

1. DARI  
BAWAH  
(BOTTOM-  
UP) 25%

2. DARI  
ATAS  
(TOP-  
DOWN)  
20%

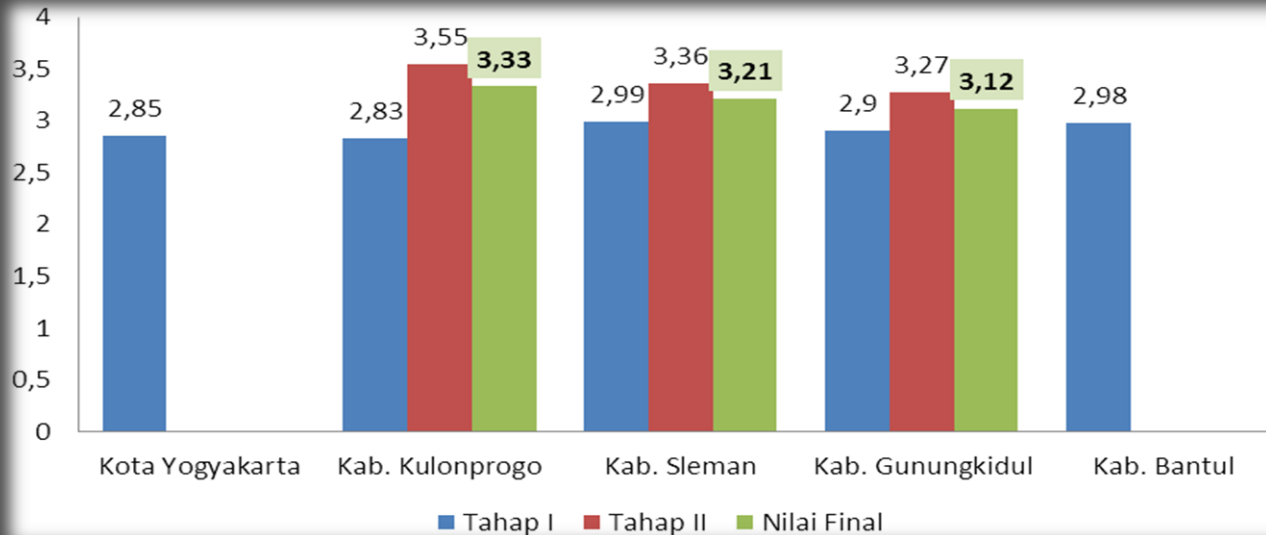
3. TEKNO-  
KRATIK  
20%


4. POLITIK  
20%


5. INOVASI  
15%


# HASIL PENILAIAN

## Reka Cipta Bhakti Nugraha



 tahap I Penilaian dokumen RKPD Kab/kota se-DIY 2016 7-11 Maret 2016 pada tahap ini Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta ter-eliminasi

 tahap II 3 besar kabupaten (kulon progo, sleman, gunungkidul) mengikuti verifikasi dokumen dan menyampaikan penjelasan proses perencanaan pembangunan dihadapan tim penilai provinsi 14-15 Maret 2016 dengan menghadirkan stakeholder kabupaten (DPRD, SKPD, Desa/ Kecamatan, swasta, LSM, dan pihak terkait)

 Finalisasi penilaian dengan bobot dan penyampaian kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas 18 Maret 2016



TERBAIK III

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



*Gunungkidul*  
the hidden paradise of jogja

TERBAIK II

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN



# TERBAIK I

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO



*Kulonprogo*  
the jewel of java



# BEBERAPA CATATAN HASIL PENILAIAN

Dari aspek penyusunan dokumen RKPD nampak bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota cukup menguasai mekanisme penyusunan dokumen rencana pembangunan, yang perlu disoroti adalah rencana pembangunan daerah itu sendiri. Berikut catatan terhadap hasil penilaian Tim;

KETERKAITAN	Pada kabupaten/Kota yang Kepala Daerahnya baru saja dilantik memang mengalami kesulitan mengkaitkan RKPD dengan RPJMD Kabupaten/Kota, karena belum atau sedang disusun, walaupun sebetulnya dapat digunakan draft RPJMD
KONSISTENSI	Salah satu kelemahan dalam hal ini adalah tidak diacunya hasil pelaksanaan RKP 2015 sebagai <i>bench-mark</i> bagi program tahun 2016
KELENGKAPAN & KEDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada umumnya cukup jelas tercantum dalam RKP 2016, kerangka ekonomi dan keuangan, namun arah pertumbuhan ekonomi masih belum mendasarkan pada evaluasi tahun 2015,</li><li>2. Arah kebijakan pembangunan manusia belum jelas.</li><li>3. Pemilihan sektor unggulan kurang didukung dengan kerangka logis.</li></ol>

**KELENGKAPAN &  
KEDALAMAN**

4. Arah kebijakan berwawasan lingkungan masih belum mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena indikator-indikator sering tidak terukur.
5. Banyak pemerintah daerah yang tidak merencanakan program Reformasi Birokrasi

**KETERUKURAN**

Tidak tersedia rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program dan output kegiatan dengan indikator kerja terukur tahun 2016

**INOVASI  
KEBIJAKAN**

Tidak ditemukan adanya kebijakan pembangunan yang inovatif secara holistik-tematik, integratif dan spatial

**CATATAN  
TAMBAHAN**

Konsepsi “*Jogja Gumregah*” belum secara jelas tercermin dalam program-program pembangunan di daerah (kabupaten/kota)



# TIM PENILAI INDEPENDEN

## *Tingkat Provinsi*



**Ir. Bayudono, MSc.**  
**Ketua Tim**  
*Ketua Dewan Riset Daerah DIY*



**Sekretaris Tim**  
*Ketua Program Studi S3 MAP,  
Fisipol UGM*



**Retno Widodo D.P., ST, M.Sc, Ph.D.**  
**Anggota Tim**  
*Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah  
dan Kota, UGM*



**Wasingatu Zakiyah, SH.**  
**Anggota Tim**  
*Executive Director Perkumpulan IDEA  
(Institute of Development and Economic  
Analysis), Yogyakarta*



**Sri Purnaningsih, S.IP.,  
MPA.**  
**Anggota Tim**  
*Pengelola Diklat MAP  
FISIPOL UGM,*

